

No. Katalog: 7102025.7407

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN WAKATOBI

2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAKATOBI**

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN WAKATOBI

2018



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN WAKATOBI 2018

ISBN : 978-602-6461-29-2

Katalog BPS : 7102025.7407

Nomor Publikasi : 74070.1915

Ukuran Buku : 14,8 × 21,0 cm

Jumlah Halaman : vi + 40 halaman

Naskah :

Seksi Statistik Distribusi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

Gambar Kulit :

Seksi Statistik Distribusi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

Dicetak Oleh :

CV. Primatama Sultra

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum :
Towedy Marthinus Layico, S.Si.

Penanggung Jawab Teknis :
Chandra Ciputra Suyadi, SST.

Penyunting :
Chandra Ciputra Suyadi, SST.

Penulis Naskah :
Ryan Willmanda Januardi, SST.

Infografis :
Ryan Willmanda Januardi, SST.
(Ilustrasi: www.freepik.com)

Gambar Kulit dan Perwajahan Isi :
Ryan Willmanda Januardi, SST.

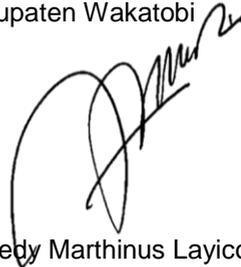
Kata Pengantar

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan indeks yang menggambarkan tingkat kemahalan harga barang atau jasa konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan. Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan atau konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi.

Data IKK merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) di samping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan data IKK di Kabupaten Wakatobi tahun 2018.

Semoga publikasi ini bermanfaat dan memenuhi harapan pengguna data. Dengan menyadari akan ketidaksempurnaan dari publikasi ini, kami dengan senang hati menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun demi kesempurnaan publikasi ini di waktu yang akan datang.

Wangi-Wangi, Oktober 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Wakatobi



Toweddy Marthinus Layico, S.Si.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I:	
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Konsep dan Definisi	4
BAB 2:	
Metodologi	7
2.1 Indeks Kemahalan Konstruksi	7
2.2 Paket Komoditas IKK	10
2.3 Diagram Timbang IKK	14
2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)	17
BAB 3:	
Ulasan Ringkas	19
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi	19
3.2 Dana Alokasi Umum Kabupaten Wakatobi	26
3.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Wakatobi	26
Lampiran	31

<https://wakatobikab.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Otonomi Daerah dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan Otonomi Daerah menggunakan sistem desentralisasi yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Selain itu, Otonomi Daerah diharapkan mampu mengatasi masalah ketimpangan keuangan antarwilayah di Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.

Pembangunan terdesentralisasi yang diterapkan membutuhkan suatu indikator untuk perimbangan keuangan daerah otonom. Untuk mendukung hal ini, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu dana perimbangan tersebut yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam mendanai kebutuhan daerah.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21 tentang alokasi DAU, DAU merupakan instrumen transfer yang bertujuan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antardaerah, sekaligus pemeratakan kemampuan antardaerah (*equalization grant*). Dalam penyusunan besaran DAU untuk masing-masing daerah, beberapa komponen data yang diperlukan yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita.

IKK didefinisikan sebagai suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antarwilayah dibandingkan dengan suatu kota acuan. Untuk menghitung IKK, diperlukan beberapa data yaitu: harga bahan bangunan atau konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, upah jasa konstruksi, dan bobot atau diagram timbang. IKK pertama kali dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2002 untuk keperluan penghitungan DAU 2003 yang kemudian dilanjutkan hingga sekarang.

1.2 Tujuan

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penyusunan publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Wakatobi tahun 2018 ini adalah:

1. Memberikan gambaran komponen-komponen penyusun Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Wakatobi Tahun 2018;
2. Mengetahui berapa nilai Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Wakatobi Tahun 2018;
3. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan daerah dan pembangunan daerah, sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten Wakatobi kedepannya dapat lebih terarah dan tepat sasaran;
4. Untuk membantu pengambil kebijakan, akademisi/peneliti, dan/atau pengguna data lainnya dalam memahami keadaan masyarakat Kabupaten Wakatobi secara spesifik

1.3 Ruang Lingkup

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil pengolahan dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Wakatobi tahun 2018 yang diperoleh dari kegiatan Survei Harga Kemahalan Konstruksi (VIKK) yang dilakukan setiap triwulan oleh Badan Pusat Statistik. IKK tahun 2018 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 (empat) periode pencacahan, yaitu periode akhir Juli 2017, periode akhir Oktober 2017, periode akhir Januari 2018, dan periode akhir April 2018.

Sumber data lain yang digunakan dalam penghitungan IKK adalah data sekunder berupa data realisasi APBD Kabupaten Wakatobi dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan data BoQ dari Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Wakatobi. Dari data tersebut dibuat diagram timbang umum IKK Kabupaten Wakatobi.

1.4 Konsep Definisi

a. Bahan Bangunan atau Konstruksi

Bahan bangunan atau konstruksi didefinisikan sebagai material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan atau konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.

b. Kegiatan Konstruksi

Kegiatan Konstruksi didefinisikan sebagai suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang tercatat dalam penghitungan IKK hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan konstruksi antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan

drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan telekomunikasi.

c. Sewa Alat Berat

Harga sewa alat berat konstruksi didefinisikan sebagai harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini yaitu satu bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek dan juga tidak termasuk biaya jasa operator. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki batas umur maksimal yaitu 8 tahun.

<https://wakatobikab.bps.go.id>

BAB 2

METODOLOGI

2.1 Indeks Kemahalan Konstruksi

Sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang relatif beragam dari jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, infrastruktur diduga memegang peranan dalam penentuan harga konstruksi di Indonesia. Semakin sulit letak geografis suatu daerah, maka diduga semakin tinggi pula tingkat harga konstruksi di daerah tersebut. Untuk melihat perbedaan tingkat harga konstruksi antar wilayah, disusun suatu indeks sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografisnya yang dikenal dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

IKK merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan harga bahan bangunan atau jasa konstruksi antar lokasi yang berbeda pada periode yang sama dibandingkan dengan suatu kota acuan. Lebih lanjut, IKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan atau konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi.

Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan

pada lokasi masing-masing. Penghitungan IKK, karenanya didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodasi berbagai macam rancangan dan model.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan harga input dan yang kedua dengan pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Di sisi lain, pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Namun, terdapat kelemahan pada pendekatan ini, yaitu dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga kurang sesuai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya ialah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga

dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada di atas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai.

Dalam penghitungan IKK diperlukan data/komponen penunjang, yaitu paket komoditas, diagram timbang, dan data harga jenis bahan bangunan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK. Selain itu, ditetapkan pula suatu kabupaten/kota sebagai acuan dalam penghitungan indeksnya. Penentuan kota acuan dalam penghitungan IKK dilakukan dengan menentukan salah satu kabupaten/kota yang memiliki nilai IKK mendekati angka rata-rata seluruh kabupaten/kota se-Indonesia dengan mempertimbangkan kelengkapan sumber data. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK diduga untuk memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK-nya. Pada tahun 2015 hingga 2017 digunakan Kota Surabaya sebagai kota acuan, sementara pada tahun 2018 digunakan Kota Semarang sebagai kota acuan.

2.2 Paket Komoditas IKK

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Pendekatan ini digunakan dalam *International Comparison Programs* (ICP) tahun 2005. Dalam metode BOCC, data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah. Komponen konstruksi merupakan output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini yaitu semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan dengan tujuan memberikan perbandingan harga konstruksi antarwilayah yang lebih sederhana dan biaya yang murah serta memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BoQ).

Mengacu pada pendekatan BOCC, paket komoditas IKK didefinisikan sebagai suatu keranjang atau paket yang terdiri dari sejumlah bahan bangunan atau konstruksi yang dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan atau konstruksi. Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antarwilayah, komponen tersebut dikelompokkan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*.

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori yang disebut sebagai *basic heading*. Berikut klasifikasi dari sektor konstruksi tersebut:

1. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

- a. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estat, rumah susun, dan perumahan dinas.
- b. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.

2. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

a. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian:

- Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (reservoir), bendungan (weir), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
- Bangunan proses tempat hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.

- b. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan:
- Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - Bangunan jalan dan jembatan kerera, meliputi: pembangunan jalan dan jembatan kereta.
 - Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
- c. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi:
- Bangunan elektrik, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi.
 - Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 - Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar

microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.

- Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah, saluran drainase pada gedung.
- Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
- Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
- Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

3. Bangunan Lainnya

Sedangkan jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya adalah sebagai berikut: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

2.3 Diagram Timbang IKK

Diagram timbang yang digunakan dalam penghitungan IKK tahun 2018 terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang IKK umum. IKK tahun 2018 menggunakan penimbang *updating* BoQ sampai tahun 2017. Pendekatan BOCC menggunakan 3 sistem penimbang. Macam-macam jenis penimbang tersebut adalah sebagai berikut:

1. W1 adalah penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, dan bangunan lainnya.
2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi.
3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk material, upah tenaga kerja, dan sewa peralatan konstruksi.

Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung penimbang IKK adalah mengumpulkan *Bill of Quantity* (BoQ). Pengumpulan BoQ ini dilakukan melalui survei diagram timbang IKK hingga tahun 2017. BoQ dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota di Indonesia agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Penghitungan IKK 2018 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_j = \sum_{k=1}^n p_k \cdot q_k$$

dengan:

- NK_j = Nilai komponen ke-j
- p_k = Harga material/upah/sewa alat ke-k
- q_k = Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k
- n = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-j

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP) sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy* (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_j = \alpha_i C_i + \beta_j P_j + \varepsilon$$

dengan:

- NK_j = Nilai komponen ke-j
- C_i = dummy kabupaten/kota ke-i
- P_j = dummy komponen ke-j dalam suatu sistem dan bangunan

α_i dan β_j = Koefisien regresi

$$PPP \text{ (Purchasing Power Parity)}_{sistemi} = \exp(\alpha_i)$$

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan_i} = \prod_{i=1}^n (PPP_{sistem_i})^{w_{2i}}$$

dengan:

n = Jumlah sistem dalam suatu bangunan

Tahap penghitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan menggunakan metode rata-rata geometrik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{proyek_i} = \prod_{i=1}^n (PPP_{bangunan_i})^{\frac{1}{n}}$$

dengan:

n = Jumlah bangunan dalam suatu proyek

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{proyek_i})^{w_{1i}} \right) \cdot 100$$

dengan:

n = Jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota

2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU salah satunya sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi.
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Besaran alokasi DAU per daerah dihitung menggunakan rumus yang tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005, sebagai berikut:

$$DAU = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

dengan:

AD = Proyeksi Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam setahun ke depan

CF = Kebutuhan Fiskal (KbF) – Kapasitas Fiskal (KpF)

KbF = Total Belanja Daerah (TBD) \times ((%Jumlah Penduduk) + (%Luas Wilayah) + (%Invers Indeks Pembangunan Manusia) + (%Indeks Kemahalan Konstruksi) + (%PDRB per Kapita))

KpF = (%Pendapatan Asli Daerah) + (%Dana Bagi Hasil)

Setiap daerah menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. Bahkan di beberapa daerah yang memiliki Kapasitas Fiskal sangat besar dimungkinkan untuk tidak mendapat DAU (DAU = 0).

<https://wakatobikab.bps.go.id>

BAB 3 ULASAN RINGKAS



3.1 Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi

3.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia yang dikenal dengan keindahan bawah lautnya. Kabupaten

Wakatobi merupakan daerah kepulauan yang terletak di antara Laut Flores dan Laut Banda, terdiri dari empat pulau besar yang membentuk nama Wakatobi, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Kabupaten Wakatobi terletak di bagian paling tenggara dari Pulau Sulawesi. Ibukota Kabupaten Wakatobi terletak di Pulau Wangi-Wangi tepatnya di Kecamatan Wangi-Wangi. Kabupaten Wakatobi juga berada pada Pusat Kawasan Segi Tiga Karang Dunia (*Coral Triangle Center*) yang meliputi 6 (enam) negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Solomon Island, dan Timor Leste.

Secara astronomis, Kabupaten Wakatobi terletak pada posisi titik koordinat $5^{\circ}00'00''$ – $6^{\circ}15'00''$ Lintang Selatan (sepanjang ± 160 kilometer) dan $123^{\circ}20'24''$ – $124^{\circ}38'24''$ Bujur Timur (sepanjang ± 120 kilometer) yang membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Indonesia. Secara geografis, Kabupaten Wakatobi berbatasan dengan Laut Banda di sebelah utara dan timur, sementara di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Laut Flores. Berdasarkan letak wilayahnya terhadap laut, sebagian besar desa di Kabupaten Wakatobi merupakan desa pesisir yang jumlahnya mencapai 90 desa, sedangkan sisanya 10 desa merupakan desa bukan pesisir.

Kabupaten Wakatobi terbagi menjadi delapan wilayah administratif kecamatan, yakni Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomia,

Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Binongko, dan Kecamatan Togo Binongko. Total luas wilayah Kabupaten Wakatobi mencapai 473,62 km². Kecamatan terluasnya adalah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dengan luas sebesar 123,55 km² atau sekitar 26 persen dari total luas Kabupaten Wakatobi.

Tabel 1. Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Binongko	68,63	14,49
Togo Binongko	43,85	9,26
Tomia	32,82	6,93
Tomia Timur	46,02	9,72
Kaledupa	35,18	7,43
Kaledupa Selatan	56,08	11,84
Wangi-Wangi	67,49	14,25
Wangi-Wangi Selatan	123,55	26,09
Kabupaten Wakatobi	473,62	100,00

Sumber: Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017

Kecamatan Togo Binongko menjadi kecamatan yang paling jauh letaknya dari pusat pemerintahan yang berada di Pulau Wangi-Wangi dengan jarak kurang lebih 96 kilometer antara ibu kota kecamatan Togo Binongko di Kelurahan Popalia dan ibukota kabupaten di Kelurahan Wanci. Pulau terjauh dari Pulau Wangi-Wangi yaitu Pulau Runduma sejauh 144 kilometer dan Pulau Moramaho sejauh 216 kilometer.

Kondisi topografi pedesaan Kabupaten Wakatobi 75 persen berada di hamparan (flat) terutama di bagian selatan pulau Wangi-Wangi, bagian utara dan selatan pulau Kaledupa, bagian Barat dan Timur pulau Tomia, serta wilayah bagian selatan pulau Binongko, dengan ketinggian tempat berkisar antara 3 – 20 mdpl. Sedangkan bentuk topografi perbukitan, berada di tengah-tengah pulau dengan ketinggian berkisar antara 20-350 mdpl.

Selain bentangan pulau-pulau kecil, relief dan topografi di Kabupaten Wakatobi juga membentang Gunung Tindoi di Pulau Wangi-Wangi, Gunung Pangilia di Pulau Kaledupa, Gunung Patua di Pulau Tomia dan Gunung Watu'a di Pulau Binongko. Pada puncak gunung di empat pulau besar tersebut, terdapat situs peninggalan sejarah berupa benteng dan makam yang sangat erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Kabupaten Wakatobi maupun sejarah perkembangan kejayaan Kesultanan Buton, Tidore, dan Ternate. Situs sejarah dimaksud ialah Benteng Liya, Benteng Tindoi, Benteng Patu'a, dan Benteng Suosuo

serta peninggalan benda-benda purbakala lainnya. Kesemuanya merupakan aset daerah yang sangat berharga, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai obyek wisata budaya, baik nasional maupun internasional.

3.1.2 Kondisi Transportasi

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan diperlukan demi memudahkan proses mobilisasi penduduk antar daerah dan menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, utamanya untuk daerah-daerah sulit terjangkau. Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat, yaitu sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah.

Terkait dengan besaran harga barang dan jasa pada bidang konstruksi, selain ketersediaan barang/jasa (*supply*), kelancaran distribusi barang/jasa (konstruksi) ke suatu wilayah diduga berpengaruh besar. Dengan demikian kondisi jalan menjadi syarat utama dalam pendistribusian barang ke suatu wilayah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembentukan harga barang/jasa konstruksi. Data pada tahun 2018 menunjukkan panjang jalan di Kabupaten Wakatobi tercatat sepanjang 490.276 kilometer.

Dilihat dari jenis permukaannya, jalan dengan permukaan aspal tercatat sepanjang 237.332 kilometer,

jalan dengan permukaan kerikil sepanjang 83.262 kilometer, dan jalan dengan permukaan tanah sepanjang 169.682 kilometer.

Tabel 2. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Wakatobi, 2015-2018 (kilometer)

Jenis Permukaan	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aspal	192.070	213.782	213.782	237.332
Kerikil	60.750	109.832	109.832	83.262
Tanah	22.790	166.662	166.662	169.682
Tidak Terinci	143.400	-	-	-
Jumlah	419.010	490.276	490.276	490.276

Sumber: Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Wakatobi

Dilihat dari kondisi permukaannya, jalan dengan kondisi baik tercatat sepanjang 141.591 kilometer, yang tergolong kondisi sedang sepanjang 46.280 kilometer, yang tergolong kondisi rusak sepanjang 27.084 kilometer, dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 275.321 kilometer.

Tabel 3. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Wakatobi, 2015-2018 (kilometer)

Kondisi Jalan	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Baik	103.240	98.791	138.960	141.591
Sedang	62.840	38.781	46.918	46.280
Rusak	87.430	61.922	27.084	27.084
Rusak Berat	22.100	290.782	277.314	275.321
Tidak Terinci	143.400	-	-	-
Jumlah	419.010	490.276	490.276	490.276

Sumber: Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Wakatobi

Selain kondisi jalan, pembentukan harga barang/jasa konstruksi juga diduga dipengaruhi oleh jarak barang masuk dari luar Kabupaten Wakatobi menuju Kabupaten Wakatobi. Akses barang masuk dari luar Kabupaten Wakatobi melalui empat pelabuhan, yaitu Pelabuhan Wanci, Pelabuhan Kaledupa, Pelabuhan Tomia, dan Pelabuhan Binongko. Dari keempat pelabuhan tersebut, bongkar dan muat barang paling banyak terjadi di Pelabuhan Wanci. Secara umum pelabuhan memiliki fungsi sebagai mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan.

3.2 Dana Alokasi Umum Kabupaten Wakatobi

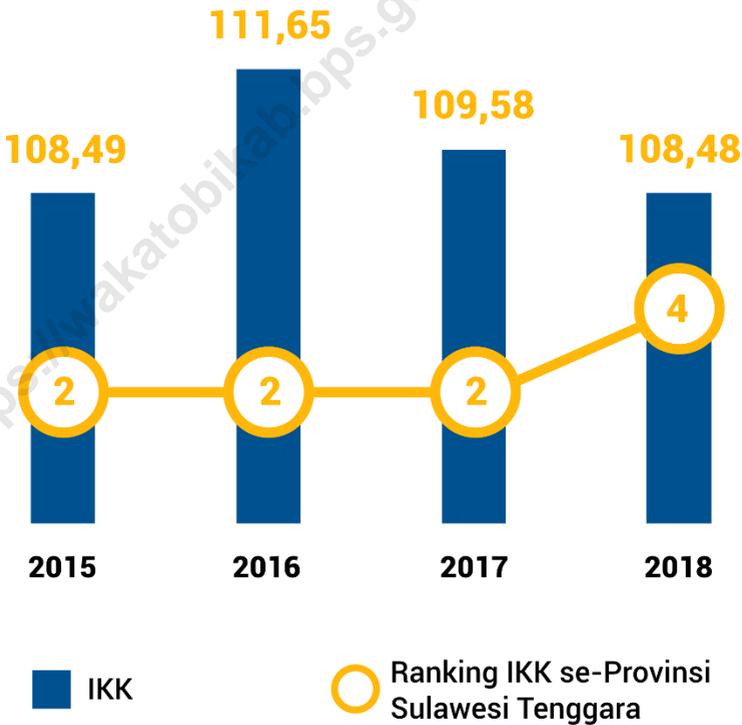
Alokasi DAU bagi tiap daerah sangat penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan tiap daerah. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota berhak menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Suatu daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. IKK merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam penghitungan DAU. Besaran DAU Kabupaten Wakatobi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp463.652.327.000,00

3.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Wakatobi

IKK merupakan indeks spasial yang digunakan untuk membandingkan tingkat harga/kemahalan bahan bangunan/jasa konstruksi di suatu daerah dibandingkan kota acuan. Pada tahun 2018, kota di Indonesia yang menjadi kota acuan adalah Kota Semarang (IKK = 100). Semakin besar IKK menunjukkan relatif semakin tinggi harga bahan bangunan/konstruksi di wilayah tersebut dibandingkan dengan kota acuan. Harga bahan bangunan atau konstruksi dan harga sewa alat berat di suatu daerah diduga dipengaruhi oleh letak geografis dan kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan bahan bangunan secara mandiri.

Pada tahun 2018, nilai IKK Kabupaten Wakatobi tercatat sebesar 108,48. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga barang/jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Wakatobi 8,48 persen lebih tinggi/mahal dibandingkan dengan kota acuan (Kota Semarang). Hal ini wajar karena sebagian besar barang konstruksi didatangkan dari luar Kabupaten Wakatobi.

Gambar 1. IKK dan Ranking IKK Kabupaten Wakatobi, 2015-2018



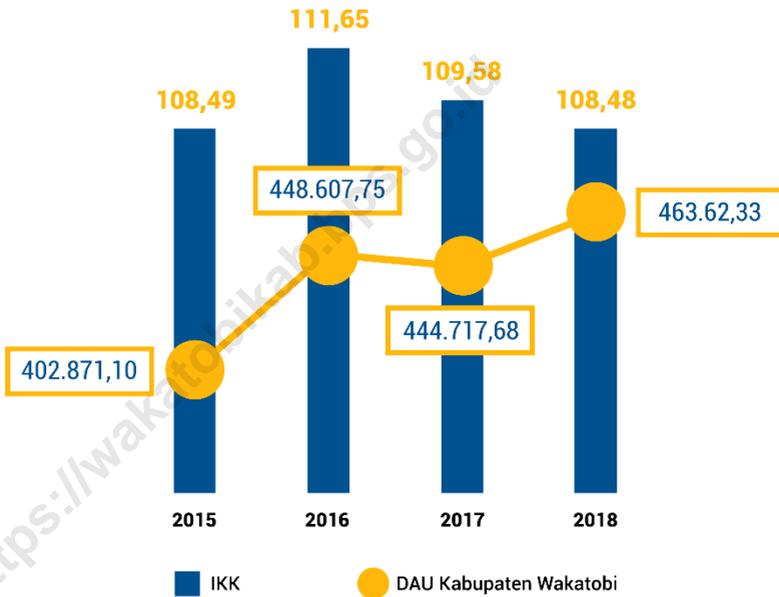
Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota, BPS

Dalam kurun waktu 2016-2018, IKK Kabupaten Wakatobi terus mengalami penurunan, yang artinya dari tahun ke tahun harga barang/jasa konstruksi di Kabupaten Wakatobi mengalami penurunan yang lebih cepat terhadap kota acuan (Kota Semarang) dibandingkan penurunan harga barang/jasa di wilayah lain terhadap kota acuan (Kota Semarang). Pada tahun 2016, IKK Kabupaten Wakatobi sebesar 111,65 menurun menjadi 109,58 pada tahun 2017, dan kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 108,48. Penurunan IKK ini diduga karena efek dari adanya Tol Laut sehingga margin biaya distribusi barang konstruksi dari luar Kabupaten Wakatobi ke Kabupaten Wakatobi berkurang, kondisi ini menyebabkan harga barang konstruksi menjadi lebih murah terhadap kota acuan. Hal ini tampak dari meningkatnya jumlah proyek dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Wakatobi.

Jika diurutkan dari nilai IKK tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tahun 2018 Kabupaten Wakatobi menempati urutan ke-4 dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Semakin kecil ranking IKK maka semakin besar nilai IKK suatu wilayah. Ranking IKK tahun 2017 sama seperti ranking tahun 2015 dan 2016, yaitu ranking 2. Hal ini menandakan semakin murah harga barang/jasa konstruksi di Kabupaten Wakatobi. Penurunan harga barang/jasa konstruksi yang signifikan dibandingkan wilayah lain terjadi pada tahun 2018 jika dilihat dari penurunan ranking IKK Kabupaten Wakatobi dari 2 ke 4.

IKK merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam penghitungan DAU. Perolehan DAU Kabupaten Wakatobi sejalan dengan nilai IKK-nya.

Gambar 2. IKK dan DAU Kabupaten Wakatobi (juta rupiah), 2015-2018



Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, BPS

Selama periode 2015-2017, DAU Kabupaten Wakatobi sejalan dengan besaran nilai IKK Kabupaten Wakatobi. Namun pada tahun 2018, meskipun IKK Kabupaten Wakatobi mengalami penurunan, DAU Kabupaten Wakatobi

mengalami peningkatan. Hal ini bisa jadi karena faktor dari aspek lain di luar IKK.

Kabupaten Wakatobi sebagai daerah kepulauan juga memiliki perbedaan penghitungan DAU dengan daerah lain. Adanya afirmasi daerah kepulauan dengan menghitung bobot luas perairan/laut dalam alokasi DAU juga dapat memengaruhi peningkatan DAU Kabupaten Wakatobi. Dengan adanya peningkatan DAU ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Wakatobi.

<https://wakatobikab.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://wakatoba.kemppps.go.id>

Lampiran 1. Paket Komoditas Penghitungan IKK Tahun 2018

No.	Jenis Barang	Kualitas	Merk	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah Urug	Biasa		m ³
2	Pasir	Pasir Pasang Pasir Beton/Cor		m ³
3	Batu Pondasi	Batu Kali Uuth Batu Kali Belah Batu Gunung		m ³
4	Batu Bata	Batu Bata Tanah Liat (bata merah)		buah
5	Batako	Batako Berlubang (<i>hollow block</i>) Batako Tidak Berlubang (<i>solid block</i>)		buah
6	Bata Ringan	Cellcon atau Hebel		m ³
7	Batu Split	Ukuran 1 – 2 cm Ukuran 2 – 3 cm Ukuran 3 – 4 cm		m ³
8	Seng Gelombang	Ukuran (0,02 x 80 x 180) cm Ukuran (0,03 x 80 x 180) cm	Gajah (elephant, angsa, dll)	lembar
9	Paku	Paku Kayu 2" – 6" Paku Beton Paku Seng Paku Triplek		kg
10	Semen Portland	Portland Composite Cement (PCC) (SNI 15-7064- 2004) Portland Pozzoland Cement (PPC) (SNI 15-0302- 2004)	Tiga Roda (gresik, padang, tonasa, dll)	zak

No.	Jenis Barang	Kualitas	Merk	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Besi Beton (<i>Full</i>) SNI 07-2052- 2002	Besi Beton Polos (BJTP 24) Ukuran d = 6 mm; p = 12 m Besi Beton Polos (BJTP 24) Ukuran d = 8 mm; p = 12 m Besi Beton Polos (BJTP 24) Ukuran d = 10 mm; p = 12 m Besi Beton Ulir (BJTS 32) Ukuran d = 10 mm; p = 12 m Besi Beton Ulir (BJTS 32) Ukuran d = 16 mm; p = 12 m		batang
12	Bak Mandi Fiber	Ukuran (55 x 55 x 60) cm Ukuran (60 x 60 x 60) cm Ukuran lainnya	Walrus (warren, techplas, dll)	buah
13	Kloset	Kloset Duduk Standar (lengkap dengan tabung) Kloset Jongkok	Toto (warna putih); (ina, duty, dll)	buah
14	Seng Plat	Seng Plat BLJS 20; L = 45 Seng Plat BLJS 20; L = 60		m
15	Pipa PVC	AW ϕ ½" Panjang 4 m AW ϕ ¾" Panjang 4 m	Wavin (maspion, vinilon, dll)	batang

No.	Jenis Barang	Kualitas	Merk	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		AW ϕ 1" Panjang 4 m		
		AW ϕ 4" Panjang 4 m		
		D ϕ 3" Panjang 4 m		
		D ϕ 4" Panjang 4 m		
16	Kayu Balok	Kayu Kelas I		m ³
		Kayu Kelas II		
		Kayu Kelas III		
17	Kayu Papan	Kayu Kelas I		m ³
		Kayu Kelas II		
		Kayu Kelas III		
18	Kayu Lapis/Triplek	Triplek 3 mm		lembar
		Triplek 4 mm		
		Triplek 6 mm		
		Triplek / Plywood 9 mm		
		Triplek / Plywood 12 mm		
19	Cat Emulsi	Cat Tembok Eksterior	Catylac (avilex, vinilex, dll)	25 kg
		Cat Tembok Interior		
		Cat Genteng		
20	Cat Minyak	Cat Besi/Kayu	Avian	kg
		Cat Meni Besi/Kayu	(altex, emco, dll)	
21	Tegel/Keramik	Keramik Uk. 30 x 30 cm (putih polos)	Mulia (asiatile, ikad, dll)	m ²
		Keramik Uk. 40 x 40 cm (putih polos)		
		Keramik Uk. 30 x 30 cm (warna/motif)		
		Keramik Uk. 40 x 40 cm (warna/motif)		

No.	Jenis Barang	Kualitas	Merk	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	Genteng/Atap	Genteng Tanah Liat Tradisional (tidak berglasur) Genteng Tanag Liat Keramik		buah
23	Atap Metal	Atap Metal Tidak Berpasir Atap Asbes	Sakura Roof (multiroof, sokarroof, dll)	lembar
24	Kaca	Kaca Polos Bening 3 mm Kaca Polos Bening 5 mm Kaca Riben 5 mm	Asahi (mulia, tossa, dll)	lembar
25	Aspal	Curah Grade 60/70 – Lokal Drum Grade 60/70 (155 kg) – Lokal Curah Grade 60/70 – Impor Drum Grade 60/70 (155 kg) – Impor		ton drum ton drum
26	Gypsum	Gypsum Plafon 9 mm Gypsum List Polos (220 x 11 x 3) cm	Jayaboard (elephant, knauf, dll)	lembar batang
27	Kabel	Kabel NYA Ukuran 1 x 1,5 mm ² Kabel NYA Ukuran 1 x 2,5 mm ² Kabel NYA Ukuran 3 x 2,5 mm ²	Eterna (prama, visicom, dll)	m

No.	Jenis Barang	Kualitas	Merk	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	Bahan Bangunan Siap Pasang Dari Kayu Kelas II	Kabel NYA Ukuran 3 x 4 mm ² Daun Pintu (2 m x 1 m x 4 cm) Daun Jendela (dengan kaca, ukuran 50 cm x 120 cm) Kusen Pintu (2 x 1) m Kusen Jendela (50 x 120) cm		buah
29	Mesin Pompa Air (Tanpa Otomatis)	Pompa Shallow Pump (kedalaman s.d. 7 m) Pompa Semi Jet Pump (kedalaman 8 – 12 m) Pompa Semi Jet Pump (kedalaman 13 – 20 m)	Shimizu (sanyo, panasonic, dll)	buah
30	Rangka Atap Baja	Profil Canal "C" Tipe C71.075 Profil Canal "C" Tipe C81.075 Profil "Omega"/ Reng Tipe AA Profil "Omega"/ Reng Tipe A		batang
31	Aluminium	Profil Kusen Aluminium 3 inci Profil Kusen Aluminium 4 inci Aluminium Lembaran 0,5 mm, panjang 2 m, lebar 1 m	Alexindo (alco, damai abadi, dll)	m

No.	Jenis Barang	Kualitas	Merk	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32	Tangki Air Fiber	Aluminium Lembarang 1 mm, panjang 2 m, lebar 1 m Ukuran 350 – 450 liter Ukuran 500 – 650 liter Ukuran 1000 – 1100 liter Ukuran 2000 – 2200 liter	Penguin (profile, excell, dll)	buah
33	Lampu	Lampu Pijar 25 W Lampu Pijar 40 W Lampu TL Panjang 18 – 20 W Lampu SL (TL Pendek) 18 W Lampu SL (TL Pendek) 20 W	Phillips (hannocs, chiyoda, dll)	buah
34	MCB (SPLN 108- 1993)	1 Fasa 4 Ampere 1 Fasa 6 Ampere 1 Fasa 10 Ampere	Schneider (merlin gerin, broco, dll)	buah
35	Excavator PC- 200	Kapasitas Bucket 0,8 m ³ Kapasitas Bucket 0,6 m ³ Kapasitas Bucket 0,4 m ³		1 bulan / 200 jam
36	Buldozer D-65	Universal Blade (U-Blade) Straight Blade (S- Blade) Bowl Dozer		1 bulan / 200 jam

No.	Jenis Barang	Kualitas	Merk	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37	Loader (Wheel atau Track)	Kapasitas Bucket 0,8 m ³ Kapasitas Bucket 0,6 m ³ Kapasitas Bucket 0,4 m ³		1 bulan / 200 jam
38	Tandem/Vibrating Roller	8 – 10 ton Kurang dari 8 ton		1 bulan / 200 jam
39	Dump Truck	Kapasitas 20 ton (Tronton) Kapasitas 12 ton (Engkel) Kapasitas 8 ton (Colt Diesel)		1 bulan / 200 jam
40	Motor Grader	≤ 100 HP > 100 HP		1 bulan / 200 jam
41	Asphalt Finisher			1 bulan / 200 jam
42	Generator Set	60 KVA 40 KVA 20 KVA		1 bulan / 200 jam
43	Upah Kepala Tukang			O-H
44	Upah Tukang Batu			O-H
45	Upah Tukang Kayu			O-H
46	Upah Instalator Listrik			Titik
47	Upah Pembantu Tukang			O-H

<https://wakatobikab.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. Utudae Samad No. 25, Wakatobi, 93795
Telp/Faks: (0404) 2222003
Homepage: <https://wakatobikab.bps.go.id>
E-mail: bps7407@bps.go.id

ISBN 978-602-6461-29-2



9 786026 461292